

ANALISIS SERAPAN ANGGARAN SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN DAN DAMPAKNYA BAGI TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN TEMANGGUNG

Nuwun Priyono¹⁾, Maya Maghfiroh²⁾, Chaidir Iswanaji³⁾

¹Fakultas Ekonomi/D3 Akuntansi, Universitas Tidar

E-mail: nuwunpriyono123@gmail.com

²Fakultas Ekonomi/D3 Akuntansi, Universitas Tidar

E-mail: mmaghfiroh136@gmail.com

³Fakultas Ekonomi/S1 Akuntansi, Universitas Tidar

E-mail: ch.iswanaji@gmail.com

Abstract

This research has the aim of determining the absorption of the budget as a measurement of the performance of the Regional Government, the supporting and inhibiting factors of budget absorption in the local government and to determine its impact on improving the welfare of the people in Temanggung Regency for the 2013-2017 period. This research is a qualitative research, using secondary data sources in the form of Budget Realization Report (LRA) and primary data in the form of interviews regarding the supporting and inhibiting factors of budget absorption. The data analysis technique was carried out using a qualitative descriptive method. The results showed that the performance ability of the Temanggung Regency Government in managing and exploring local revenue sources in 2013-2017 was good with the absorption of the revenue budget showing an average number of 99.79%. The ability of the local government of Temanggung Regency to use the budget in 2013-2017 is not good, as can be seen from the absorption of the expenditure budget which shows an average figure of 89.2%. The supporting factors for budget absorption in the Temanggung Regency Regional Government were: timeliness in reporting income, orderly administrative management, and the integrity of the revenue manager. The inhibiting factors for budget absorption in the Temanggung Regency Regional Government were: budget planning, implementation of activities, the auction process (tender), and position transfers. Then the amount of increase or decrease in the absorption of the revenue and expenditure budget can have an impact on the level of welfare which can be seen from the achievement of the HDI value in Temanggung Regency.

Keywords: Budget Absorption, Causative, Supporting, Welfare

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah mempunyai peranan yang penting untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam peningkatan pelayanan publik pada masyarakat. Kinerja pemerintah dibidang anggaran merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Indikator dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah serapan anggaran. Gambaran mengenai kinerja

pemda dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat diketahui melalui tingkat penyerapan anggaran (BPKP, 2011). Perbedaan antara jumlah alokasi anggaran dengan realisasi anggaran menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka semakin besar serapan anggaran dan mencerminkan

kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target kegiatan yang telah ditetapkan (Abdullah & Nazry, 2015).

Halim (2014) menyatakan bahwa maksimalnya penyerapan anggaran harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator yang mampu menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran menggambarkan terserapnya anggaran dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuan dalam menyerap anggaran.

Pemerintah pusat dan daerah sampai saat ini belum mempunyai definisi yang baku mengenai standar dari persentase suatu daerah masuk kedalam kategorisasi minimal dalam penyerapan APBD. Pakta integritas telah dimiliki dan ditandatangani oleh kepala SKPD beberapa daerah, yang menyatakan bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki serapan anggaran yang rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu mencapai realisasi 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif dalam Ruhmaini dkk, 2018). Tugas penting pemerintah daerah salah satunya adalah capaian target kinerja melalui pengalokasian dan pelaksanaan belanja pada APBD, yang dapat menyediakan pelayanan dan dapat membangun infrastruktur publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dinyatakan bahwa analisis serapan anggaran merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mencapai target kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai serapan anggaran khususnya pada Kabupaten Temanggung. Pemilihan Kabupaten Temanggung sebagai kajian dalam penelitian ini salah satunya dilatar belakangi oleh tingkat penyerapan anggaran yang masih belum optimal, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Tingkat Serapan Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung

Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	% serapan anggaran
2013	1.123.219.583.66	950.367.588.673	84,6%
2014	1.319.826.009.01	1.125.725.739.43	85,29 %
2015	1.573.251.241.98	1.349.483.440.29	85,78 %
2016	1.609.513.756.90	1.468.230.608.12	91 %
2017	1.500.216.453.57	1.428.210.413.58	95,2%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2013 sampai dengan 2017 masih belum optimal meskipun setiap tahun mengalami peningkatan serapan anggaran tetapi belum bisa mencapai sesuai dengan anggaran belanja terutama pada tahun 2013 yang tingkat serapan anggaran 84,6 %, pada tahun 2014 meningkat menjadi 85,29 %, kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan menjadi 85,78 %. Pada tahun 2016 Kabupaten Temanggung mampu menyerap anggaran sebesar 91% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan tingkat anggaran sebesar 95,2 %.

Kondisi ini mengindikasikan penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang masih belum optimal selama tahun anggaran 2013-2017. Belum optimalnya serapan anggaran dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat kabupaten tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat diproksi melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan seberapa besar tingkat kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat. Semakin tinggi nilainya maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut.

Dengan uraian tersebut, menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut mengenai serapan anggaran pendapatan dan belanja sebagai pengukuran kinerja pada pemerintah daerah, faktor pendukung dan penghambat serapan anggaran dan mengetahui dampaknya bagi tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung periode 2013-2017.

Mahsun (2011) menyebutkan APBD merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah berdasarkan rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan dinas/badan/lembaga sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2015, dijelaskan bahwa anggaran atau yang lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang berfungsi sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disuatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutup pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (Halim, 2012). Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah (PP No. 12 tahun 2019).

Dalam penyerapan atau realisasi anggaran mencakup satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh DPRD, realisasi anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran (Negara dkk, 2018). Serapan anggaran dimulai pada saat APBD disahkan oleh kepala daerah melalui peraturan daerah tentang APBD. Tinggi rendahnya serapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari suatu SKPD. Kegagalan target serapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi *idle money* (dana yang menganggur). Padahal apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis (BPKP, 2011).

Serapan anggaran adalah jumlah anggaran yang telah dibayarkan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD, yang angkanya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dari aspek belanja daerah, perbedaan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan daya serap anggaran yang secara tersirat menggambarkan ketidakmampuan pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan anggaran belanja. Daya serap anggaran yang tinggi bermakna bahwa sisa anggaran pada akhir tahun tidak banyak (Abdullah, et al. 2015). Menurut Zakiati (2016), serapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran. Pemerintah yang telah mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran maka telah membuat perencanaan yang baik, dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Selisih antara jumlah anggaran yang dialokasikan dengan anggaran yang terealisasi menunjukkan besarnya varian anggaran (*budget variances*). Semakin kecil varian anggaran (*budget variances*), maka

semakin besar serapan anggaran dan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target kegiatan (Abdullah & Nazry, 2015).

Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya (PMK No. 249/PMK.02/2011). Pemerintah pusat maupun daerah sampai saat ini belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk kedalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Beberapa daerah ada yang memiliki fakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat memiliki serapan anggaran yang rendah apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif, 2013).

Tugas penting dari pemerintah daerah salah satunya adalah pencapaian target kinerja melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat menyediakan pelayanan dan membangun infrastruktur publik. Tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat kinerja anggaran yaitu didasarkan pada tingkat penyerapan anggaran. Semakin besar tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan semakin rendah pula kinerja anggaran suatu pemerintah daerah. Penyerapan belanja APBD mengindikasikan kecepatan daerah dalam menggunakan dananya untuk pelayanan kepada masyarakat (Dirjen Keuangan dan Perimbangan, 2014).

Halim dan Kusufi (2012), mendefinisikan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capai suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam bidang anggaran merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut Halim (2014), penyerapan anggaran yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik. Penyerapan anggaran merupakan salah satu

indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perbandingan antara realisasi dengan anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai kebijakan yang telah dilakukan. Kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pengukur kinerja pemerintah daerah. Penyerapan anggaran sebagai pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja (PMK No. 249/PMK.02/2011).

Kesejahteraan menggambarkan dari tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan suatu negara. Menurut Boulding (dalam Swasono, 2005:6) menyatakan bahwa *the subject matter of welfare economics*, berbeda dengan lain-lain bentuk *welfare*, harus disepakati dari konsep harta atau riches ekonomi. Kemudian konsep social optimum, yaitu paretian optimality (optimalitas ala Pareto dan Edworth), dimana economic efficiency mencapai social optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung (better-off) tanpa membuat orang lain merugi (worse-off). Dalam pada itu pemborosan masih terjadi bila seseorang masih bisa menolong orang lain.

Menurut *United Nations Development Programe* (UNDP) pada tahun 1990 telah menyusun suatu indikator kesejahteraan manusia. Indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa kemajuan manusia dapat dilihat dari beberapa faktor seperti: tingkat harapan hidup (*life expectancy at age*), tingkat melek huruf masyarakat (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*men years of schooling*), serta tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing-masing (*purchasing power parity*). Kemudian Kuncoro (2003) menyebutkan bahwa penetapan kategori IPM didasarkan pada skala 0,0-1,0 yang terdiri dari 3 kategori. Kategori rendah memiliki nilai IPM dengan rentang nilai 0-0,5, kategori menengah memiliki nilai IPM antara 0,51-0,79 dan kategori tinggi memiliki nilai IPM dengan rentang nilai 0,8-1,0. Sedangkan BPS (2012) menyatakan bahwa konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berskala

internasional, menetapkan peringkat kinerja pada skala 0,0 – 100,0 dengan katagori sebagai berikut : tinggi mempunyai nilai $IPM \geq 80,0$, menengah atas mempunyai nilai $66,0 \leq IPM \leq 80,0$, menengah bawah mempunyai nilai $50,0 \leq IPM \leq 66$ dan rendah mempunyai nilai $IPM \leq 50,0$.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan studi ini dijelaskan dibawah ini. Ledy (2017) melakukan penelitian yang menganalisis faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Taulud. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara bersamaan (simultan) maupun terpisah (parsial) perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan APBD Kabupaten Kepulauan Taulud. Rahmah dkk (2017) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Bireun selama tahun anggaran 2013-2015. Hasil penelitian menunjukkan secara rinci semakin besar tingkat serapan anggaran maka semakin optimal kinerja anggaran, begitu juga sebaliknya.

Penelitian lain dilakukan oleh Susanti (2017), yang berkaitan dengan faktor penentu efektifitas belanja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa priorotas belanja berpengaruh terhadap efektifitas belanja, ketepatan alokasi belanja tidak berpengaruh terhadap efektifitas belanja, ketepatan waktu belanja berpengaruh terhadap efektifitas belanja, akuntabilitas berpengaruh terhadap efektifitas belanja, dan efektifitas belanja berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemudian Afrimayosi (2020) melakukan penelitian berkaitan dengan kinerja keuangan daerah, korupsi dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif teori agency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara tingkat korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Tanzeh (2011), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2018) menyatakan, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2015), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat serapan anggaran dengan staf bagian penganggaran dan perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Temanggung periode 2013-2017.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 3 cara yaitu: wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Menurut Riduwan (2010), teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan menurut Komariah dan Satori (2011) adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Moloeng (2017) menyebutkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara atau tanya jawab dilakukan dengan melibatkan 6 responden yang meliputi kepala sub bidang penganggaran, kepala

sub bidang perbendaharaan, 2 orang staf penganggaran, dan 2 orang staf perbendaharaan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Temanggung.

Analisa data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan dalam analisa data yaitu: pengumpulan data, penyajian data dan analisis data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN.

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis serapan anggaran baik pendapatan maupun belanja yang ada di Kabupaten Temanggung dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat periode tahun 2013-2017. Dibawah ini akan disajikan data penelitian mengenai tingkat serapan Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.
Tingkat Serapan Anggaran Pendapatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	% serapan	% serapan	% Serapan	% Serapan	% Serapan
PAD					
Pajak Daerah	107,4%	113%	108,18	105%	107,80%
Retribusi Daerah	105,6%	104%	42,18	103%	69,48%
Hasil Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	104,2%	100%	100,00	100%	92,98%
Lain-lain PAD yang	116,6%	137%	127,31	112%	103,00%

Sah					
Jumlah PAD	111,0%	124%	108,78	109%	100,45%
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan		78.262			
Dana Bagi Hasil Pajak	80,3%	73%	66,82	82%	89,19%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	117,8%	107%	99,73	100%	97,63%
Dana Alokasi Umum (DAU)	100,0%	100%	100,00	100%	100,00%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	89,2%	100%	96,25	93%	95,57%
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	99,1%	99%	98,69	98%	98,70%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA					
Dana Otonomi Khusus		0	0	100%	0
Dana Penyesuaian	100,0%	75%	100,31	0%	100,00%

Dana Desa	0	0%	100,00	100%	100,00%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	100,00%	75%	100,22	100%	100,00%
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	137,2%	142%	103,87	72%	100,58%
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0	0	0%	0
Bantuan Keuangan dari Propinsi	0		99,52	99%	130,62%
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Propinsi	137,2%	142%	102,02	80%	108,36%
Total Pendapatan Transfer	100,6%	96%	99,37	96%	99,74%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
PENDAPATAN HIBAH				82%	
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	40,7%	118%	99,39	82%	110,03%
Bantuan Keuangan dari	99,9%	99%	0	0%	0

Propinsi					
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	97,7%	99%	99,39	82%	110,03%
JUMLAH PENDAPATAN	101%	99%	100,63	98%	99,87%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, diolah 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dinyatakan bahwa kemampuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam penyerapan anggaran tahun selama 5 tahun berturut-turut sudah baik, dengan tingkat serapan anggaran pendapatan dari Tahun 2013 sebesar 101% dan diakhir tahun 2017 sebesar 99,87%. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam melakukan pemungutan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi target dengan serapan anggaran sebesar di Tahun 2013 sebesar 111% dan diakhir tahun 2017 sebesar 100,45%. Ini menunjukkan bahwa serapan PAD melebihi dari target yang telah ditentukan. Pelampauan penerimaan PAD diatas target merupakan sumbangan dari semua pos PAD yang seluruhnya mengalami pelampauan dari target yang ditetapkan. Sumbangan terbesar berasal dari pos pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Selain itu capaian serapan anggaran pendapatan ini juga didukung dari penerimaan dari pendapatan transfer, yang terdiri dari: dana bagi hasil baik pajak maupun sumber daya alam, DAU dan DAK. Realisasi tahun 2013 sebesar 99,1% dan pada tahun 2017 tercapai realisasi sebesar 98,7%. Rata-rata penerimaan selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 sebesar 99,79%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat mempunyai komitmen dalam memenuhi dana transfer kepada daerah. Kemudian pos lain yang memperkuat capaian realisasi serapan anggaran pendapatan yaitu dari pos transfer dari pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah, termasuk dari hibah.

Berikut ini disajikan data mengenai serapan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Periode 2013-2017.

Tabel 3
Tingkat Serapan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
	% serapan	% serapan	% serapan	% serapan	% serapan
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	95,8%	86%	91,47	91,5%	95,75%
Belanja Barang dan Jasa	90,5%	93%	87,13	87,5%	91,59%
Bunga	93,4%	50%	88,48	78,8%	54,05%
Subsidi				0	0
Hibah	92,6%	94%	74,88	98,9%	95,91%
Bantuan Sosial	97,0%	92%	96,50	95,0%	96,50%
Jumlah Belanja Operasi	94,7%	88%	89,52	90,8%	94,32%
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	57,1%	97%	80,89	88,6%	65,11%
Belanja Peralatan & Mesin	56,5%	85%	87,35	91,6%	107,78%
Belanja Gedung & Bangunan	28,7%	62%	66,09	90,5%	97,78%
Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	90,6%	93%	93,02	97,1%	97,21%
Belanja Aset Tetap Lainnya	54,2%	17%	64,42	26,4%	88,97%
Belanja Aset Lainnya		95%	0		0
Jumlah Belanja Modal	45,5%	74%	75,68	92,5%	98,61%

BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga	29,6%	83%	22,98	71,9%	0,00%
Jumlah Belanja Tak Terduga	29,6%	83%	22,98	71,9%	0,00%
JUMLAH BELANJA	84,6%	85%	85,78	91,2%	95,20%
BELANJA TRANSFER					
BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KE PEM. DESA/KEL	99,7%		98,97	99,1%	
Bagi Hasil Pajak	100,0%	100%	100,00	100,0%	100,00%
Bagi Hasil Retribusi	99,2%	99,8%	96,93	97,3%	99,02%
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0		0	0	0
BELANJA BANTUAN KE PEM. DESA/KEL	96,3%	99,97%	0	99,9%	
Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kel	96,2%		99,75	100,0%	99,83%
Bantuan Kepada Pemerintah Desa/Kel	0	95%	99,93	0	0
Jumlah Bantuan Ke Pemerintah Desa/Kelurahan	96,2%	95%	99,93	100,0%	99,83%
BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK	0		75,00		
Bantuan Kepada Partai Politik	100,0%	88,7%	0	83,5%	90,63%
Jumlah Bantuan kepada Partai Politik	100,0%	88,7%	75,00	83,5%	90,63%
JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	96,5%	95%	99,73	99,9%	99,79%
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	85,1%	86%	87,04	92,5%	96,05%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung, diolah 2020

Berdasarkan tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa kemampuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menggunakan anggaran belanja masih kurang optimal terbukti bahwa serapan belanja pada tahun 2013 hanya sebesar 85,1% meningkat di tahun 2014 sebesar 86%. Kemudian ditahun 2015 tercapai hanya sebesar 87%, ditahun 2016 sebesar 92,5% dan di tahun 2017 terealisasi sebesar 96,05%. Angka ini

menunjukkan bahwa anggaran belanja belum optimal dikelola untuk membiaya program-program pembangunan.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Analisis Serapan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Tahun 2013-2017

Menurut PMK No. 249/PMK.02/2011 salah satu indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja

atas aspek implementasi adalah penyerapan anggaran. Serapan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang maksimal mencerminkan kinerja keuangan yang baik dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lain, seperti: konsistensi dalam perencanaan, capaian keluaran dan efisiensi. Berdasarkan tabel serapan anggaran pendapatan diatas menunjukkan bahwa di tahun 2013 realisasi serapan sebesar 101%. Angka ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena diatas target yang ditentukan. Hanya terdapat 3 pos penerimaan pendapatan dari dana transfer dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang nilainya masih dibawah 90%. Pada tahun 2014 realisasi serapan anggaran pendapatan turun menjadi 99%. Angka ini disebabkan ada beberapa pos penerimaan pendapatan yang belum optimal, seperti: dana bagi hasil pajak sebesar 73% dan dana penyesuaian sebesar 75%. Kemudian realisasi serapan anggaran pendapatan pada tahun 2015 mengalami peningkatan kembali sebesar 100,63%. Terdapat 2 pos penerimaan pendapatan yang belum maksimal yaitu: retribusi pajak sebesar 42,18% dan dana bagi hasil pajak sebesar 66,82%. Besarnya realisasi serapan pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan hanya tercapai sebesar 98%. Hal ini terjadi karena terdapat 3 pos yang belum maksimal pencapaiannya. Ketiga pos tersebut yaitu: dana bagi hasil pajak sebesar 82%, Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi sebesar 72% dan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta sebesar 82%. Selanjutnya realisasi serapan anggaran pendapatan pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 99,87%. Terdapat 1 pos retribusi pajak yang belum maksimal realisasinya hanya sebesar 69,48%. Jika dilihat selama 5 tahun ada satu pos yaitu dana bagi hasil pajak yang pencapaian serapannya belum optimal yaitu rata-rata realisasinya sebesar 78,26%. Jika dilihat pada tabel realisasi pendapatan, meunjukkan bahwa rata-rata penerimaan pendapatan selama 5 tahun dari tahun 2013-2017 sebesar 99,79%.

Berdasarkan data tabel serapan anggaran belanja Kabupaten Temanggung selama tahun 2013-2017 dapat dilihat bahwa realisasi serapan anggaran belanja masih kurang optimal. Rata-rata

selama 5 tahun hanya terealisasi sebesar 89,2%. Dengan maksimalnya serapan anggaran belanja yang ada di Kabupaten Temanggung berarti bahwa semua program-program pembangunan yang meliputi berbagai kegiatan pelayanan masyarakat dapat dibiayai dan dapat dijalankan. Hal ini tentunya dapat mendorong tercapainya program-program pembangunan yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung selama 5 tahun. Berdasarkan data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 realisasi serapan anggaran belanja hanya sebesar 85,1%. Terdapat beberapa pos belanja yang realisasi serapannya masih sangat rendah yaitu: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga. Realisasi pos –pos tersebut hanya berkisar 29,6%-57,1%. Kemudian realisasi serapan anggaran belanja tahun 2014 mengalami peningkatan hanya kurang lebih 1% menjadi sebesar 86%. Nilai ini juga masih menunjukkan bahwa serapan anggaran belanja belum maksimal. Pada tahun 2015 realisasi serapan anggaran belanja juga mengalami peningkatan, akan tetapi nilainya masih sanagt kecil, menjadi sebesar 87,04%. Selanjutnya dua tahun terakhir yaitu tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Realisasi serapan anggaran belanja di tahun 106 sebesar 92,5% dan ditahun 2017 sebesar 96,05%. Berdasarkan data menunjukkan bahwa terdapat dua pos belanja yang naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2013-2015, yaitu pos belanja operasi dan pos belanja modal. Kedua pos belanja tersebut realisasinya diatas 90% selama dua tahun terakhir.

3.2.2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian penganggaran dan staf perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Temanggung dapat disimpulkan ada beberapa faktor pendukung dalam serapan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di Kabupaten Temanggung yaitu: ketepatan waktu dalam pelaporan pendapatan, tertib pengelolaan administrasi dan integritas dari pelaksana pengelola

pendapatan. Ketepatan dalam pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban. Pelaporan realisasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kesadaran dari pengelola pendapatan untuk melaporkan hasil pendapatan tiap bulannya tepat waktu merupakan faktor utama yang menjadi pendukung serapan anggaran. Kemudian, pelaksanaan pengelolaan administrasi yang tertib dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini juga mendukung serapan anggaran belanja. Nilai integritas harus ditanamkan kepada setiap individu di lingkungan kerja. Nilai-nilai integritas tersebut antara lain: jujur, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, dan sabar. Para pelaksana pengelola pendapatan sudah menerapkan nilai integritas sehingga potensi pendapatan asli daerah dapat tergal dengan optimal dan tujuan dapat tercapai.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Penganggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan staf bagian penganggaran BPPKAD Kabupaten Temanggung, dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat serapan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung antara lain: perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, proses lelang (tender), dan mutasi jabatan. Jika perencanaan anggaran yang kurang tepat antara program yang direncanakan dengan keadaan yang ada dilapangan, maka perlu dilakukan revisi. Apabila revisi ini berlangsung cukup lama maka program tidak akan berjalan sesuai jadwal. Dalam pelaksanaan kegiatan, petunjuk operasional kegiatan yang telah ditetapkan seringkali terdapat beberapa perbedaan dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Hal ini menyebabkan program belum dapat dilaksanakan. Jika terdapat jenis belanja yang pengadaan barangnya melalui proses lelang (tender) pasti ada penawaran sehingga serapan anggaran tidak optimal. Selain itu adanya pengulangan lelang juga menjadi faktor penyebab anggaran tidak terealisasi dengan baik. Mutasi jabatan juga menjadi salah satu faktor penghambat serapan, karena dengan adanya pejabat /pegawai

yang baru maka harus beradaptasi yang membutuhkan waktu, sehingga hal ini akan menjadikan anggaran dapat terlambat diserap.

3.2.3. Dampak Serapan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja bagi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Temanggung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai macam program-program pembangunan dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Serapan anggaran yang maksimal akan mendukung optimalnya pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dibawah ini data mengenai serapan anggaran, serapan belanja dan nilai IPM pada Kabupaten Temanggung periode tahun 2013-2017.

Tabel 3.3. Data Realisasi Serapan Anggaran Pendapatan, Anggaran Biaya dan Nilai IPM Kabupaten Temanggung

Tahun	% Serapan Anggaran Pendapatan	% Serapan Anggaran Belanja	Nilai IPM
2013	101%	85,1%	64,91
2014	99%	86%	67,07
2015	100,63	87,04	67,60
2016	98%	92,5%	67,60
2017	99,87%	96,05%	68,34

Sumber: Laporan realisasi anggaran Kabupaten Temanggung dan BPS (Olahan)

Berdasarkan tabel diatas besarnya realisasi serapan anggaran pendapatan selama tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Realisasi tahun 2014 mengalami penurunan kurang lebih 2%, dan di tahun 2015 mengalami kenaikan kurang lebih 1,6%. Kemudian di tahun 2016 mengalami penurunan kurang lebih 2,6% dan meningkat lagi kurang lebih 1,87% di tahun 2017. Akan tetapi secara keseluruhan dilihat dari aspek serapan anggaran rata-rata serapannya sebesar 99,79%. Dengan angka tersebut sumber penerimaan pendapatan dapat digunakan hamper seluruhnya untuk membiayai program-program pemerintah. Artinya bahwa pemerintah daerah mempunyai dana dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pelayanan yang

maksimal pada masyarakat. Realisasi serapan anggaran tersebut dapat digunakan untuk keperluan dalam melaksanakan realisasi belanja pemerintah daerah.

Dari data serapan anggaran belanja terlihat bahwa selama tahun 2013-2017 realisasi serapan anggaran belanjanya tidak sampai 100%. Besaran serapan hanya berkisar dari 85,1% -96,05%. Hal ini berarti bahwa serapan anggaran belanja masih kurang baik dan kurang optimal. Sehingga terjadi selisih 3,95%-14,9% anggaran belanja yang tidak mampu terserap oleh pemerintah daerah. Dengan kurang optimalnya serapan anggaran belanja akan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada data angka IPM yang merupakan proksi dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama tahun 2013-2017 nilai IPM mengalami kenaikan tetapi tidak signifikan. Angka IPM selama 5 tahun tersebut menunjukkan angka 64,91 sampai dengan 68,34. Rata-rata kenaikan IPM hanya sebesar 0,68 setiap tahunnya. Walaupun angka IPM tersebut masih menunjukkan dalam level menengah. Akan tetapi jika serapan anggaran pendapatan dan serapan anggaran belanja dapat optimal tentunya akan dapat meningkatkan nilai IPM. Karena pendapatan dan belanja pemerintah daerah dapat digunakan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang secara tidak langsung akan mendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.Kesimpulan

1. Kemampuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam mengelola dan menggali sumber pendapatan daerah tahun 2013-2017 sudah baik tercermin dari serapan anggaran pendapatan menunjukkan angka rata-rata 99,79% yang berarti tingkat serapan anggaran tinggi.
2. Kemampuan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dalam menggunakan anggaran belanja pada tahun 2013-2017 kurang baik terlihat dari serapan anggaran belanja menunjukkan angka rata-rata 89,2% yang

berarti tingkat serapan anggaran yang belum optimal

3. Faktor-faktor pendukung serapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2017 yaitu: ketepatan waktu dalam pelaporan pendapatan, tertib pengelolaan administrasi, dan integritas dari pelaksana pengelola pendapatan. Sedangkan faktor-faktor penghambat serapan anggaran yaitu: perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, proses lelang (tender), dan mutasi jabatan.
4. Besaran kenaikan atau penurunan dalam serapan anggaran pendapatan dan belanja dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan yang dapat dilihat dari pencapaian nilai IPM yang ada di Kabupaten Temanggung.

4.2.Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang ada dan menggali potensi yang baru.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung perlu lebih meningkatkan porsi belanja modal yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung diharapkan dapat mempertahankan hal-hal yang mendukung tercapainya serapan anggaran.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung perlu lebih meningkatkan kinerjanya khususnya dibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar anggaran dapat terserap optimal.

5. REFERENSI

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. 6(2). 272-283.
- Afrimayosi.2020.Kinerja Keuangan Daerah, Korupsi, dan Kesejahteraan Masyarakat

- Dalam Persepektif Teori Agency*. Tesis. Magister Akuntansi. STIE-YKPN Yogyakarta
- Arif, Emkhad. 2013. *Identifikasi Faktor-faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Tesis. Program Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta
- BPKP. 2011. *Menyoal Penyerapan Anggaran*. Review. Yogyakarta
- BPS. (2012). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*.
- Halim & Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik (teori, konsep dan aplikasi)*. Salemba Empat. Jakarta
- Halim. (2014). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Daerah)*. Salemba Empat. Jakarta
- Komariah & Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Ledy, G. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing. 8(1). 108-117
- Mahsun, Mohammad. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Moloeng, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Negara, P.K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). *Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 19(1), 76-91.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 249/PMK.02/2011 tentang *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*.
- Rahmah, Zuraida, & Abdullah, S. (2017). *Analisis Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 3(2), 213-222.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Ruhmaini, Abdullah, S., & Darwanis. (2018). *Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 31-43.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Susanti, Wahyu Febri Eka. 2017. *Faktor Penentu Efektifitas Belanja dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Tesis. Magister Akuntansi. STIE-YKPN Yogyakarta
- Swasono, Sri Edi. 2005. *Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, The Real War: Perang Globalnya Nixon Sedang Terjadi*. PUSTEP-UGM Yogyakarta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Penerbit Teras. Yogyakarta
- Undang-Undang No. 9 tahun 2015 tentang *Pemerintah Daerah*
- Zakiati, M. (2016). *Analisis Serapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Pemerintah Kota Sabang*. Jurnal Akuntans ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 5(4), 67-76.